



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN
BARUDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, terdapat Perangkat Daerah yang baru pada Tahun 2017;
- b. bahwa Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi harus melakukan pengelolaan anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada Standar, Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- c. bahwa untuk dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan sebagai proses akuntansi dan langkah awal pelaksanaan kegiatan akuntansi Perangkat Daerah, maka harus dilakukan pencatatan saldo awal akun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Tata Cara Pencatatan Saldo Awal Entitas Akuntansi Tahun Anggaran 2017 dalam rangka Implementasi Kelembagaan Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerinrah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWALENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN BARUDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disingkat PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

BAB II
TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 2

- (1) Saldo awal akun neraca pada laporan keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dicatat sesuai nilai saldo akhir akun Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Perangkat Daerah yang baru terbentuk sebagai entitas akuntansi mencatat saldo awal akun Tahun Anggaran 2017 dengan nilai 0 (nol) Rupiah.
- (3) Rincian pencatatan saldo awal dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Implementasi kelembagaan baru berdampak pada adanya perpindahan hak dan kewajiban entitas akuntansi.
- (2) Proses perpindahan/mutasi hak dan kewajiban dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi dalam proses akuntansi, dengan melakukan jurnal.

Pasal 4

Jurnal dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas mutasi hak dan kewajiban yang terdiri dari :

- a. Jurnal atas mutasi kas dilakukan dari Perangkat Daerah/kelembagaan lama yang memberi dan Perangkat Daerah/kelembagaan baru yang menerima, dengan daftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. Jurnal atas mutasi beban dibayar dimuka dari Perangkat Daerah/kelembagaan lama yang memberi dan Perangkat Daerah/kelembagaan baru yang menerima, dengan daftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi beban dibayar dimuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.;
- c. Jurnal atas mutasi persediaan dilakukan dari Perangkat Daerah/kelembagaan lama yang memberi dan Perangkat Daerah/kelembagaan baru yang menerima, dengan daftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- d. Jurnal atas mutasi aset tetap dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima aset dari Perangkat Daerah lama yang memberi dan Perangkat Daerah/kelembagaan baru yang menerima, dengan daftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- e. Jurnal atas mutasi aset *extracomptable* dilakukan dari Perangkat Daerah/kelembagaan lama yang memberi dan Perangkat Daerah/kelembagaan baru yang menerima, dengan daftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi aset *extracomptable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- f. Jurnal atas mutasi aset lainnya dilakukan dari Perangkat Daerah/kelembagaan lama yang memberi dan Perangkat Daerah baru/kelembagaan yang menerima, dengandaftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- g. Jurnal atas mutasi utang PFK dilakukan dari Perangkat Daerah/kelembagaan lama yang memberi dan Perangkat Daerah/kelembagaan baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi utang PFK lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- h. Jurnal atas mutasi pendapatan diterima dimuka dilakukan dari Perangkat Daerah/kelembagaan lama yang memberi dan Perangkat Daerah/kelembagaan baru yang menerima, dengan daftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi pendapatan diterima dimuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
- i. Jurnal atas mutasi utang belanja dilakukan dari Perangkat Daerah/kelembagaan lama yang memberi dan Perangkat Daerah/kelembagaan baru yang menerima, dengan daftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi utang belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini;
- j. Jurnal atas mutasi utang jangka pendek lainnya dilakukan dari Perangkat Daerah/kelembagaan lama yang memberi dan Perangkat Daerah/kelembagaan baru yang menerima, dengan daftar Perangkat Daerah/kelembagaan yang melakukan penjurnalan atas mutasi utang jangka pendek lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini;

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima atas perpindahan/mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e dilakukan paling lambat bulan Maret 2018 dengan format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perpindahan/mutasi hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, diungkap secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai Laporan Konsolidasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Lampiran I sampai dengan Lampiran XII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

RINCIAN SALDO AWAL AKUN NERACA PADA LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama	Kas di Kas Daerah(termasuk Kas di Bendahara JKN FKTP)	Kas di Bendahara Pengeluaran	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	Kas di Puskesmas	Kas Lainnya	Piutang Pajak	Penyisihan Piutang Pajak	Piutan g Retribusi	Penyisihan Piutang Retribusi	Piutan g RSUD	Penyisihan Piutang RSUD	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		677,937,368.00	7,853,500.00	-	-	161,924,621.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	3,827,801,024.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		133,917,300.00	18,688,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		-	20,455,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SEKRETARIAT DAERAH		15,338,458.00	10,838,013.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SEKRETARIAT DPRD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	67,410,723,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)		-	-	-	-	-	2,624,426,591.00	1,239,760,001.56	-	-	-	-	-	-
17	INSPEKTORAT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN PADAHERANG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN MANGUNJAYA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN KALIPUCANG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN PANGANDARAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN SIDAMULIH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN PARIGI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN CIJULANG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN CIMERAK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN CIGUGUR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN LANGKAPLANCAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		982,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO	Perangkat Daerah Kelembagaan Baru														
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN INDUSTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)	67,410,723,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)		-	-	-	-	-	2,624,426,591.00	1,239,760,001.56	-	-	-	-	-	-
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama	Piutang Lainnya	Penyisihan Piutang Lainnya	Beban Dibayar Dimuka	Persediaan	JUMLAH ASET LANCAR	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	ASET TETAP	Akumulasi Penyusutan	JUMLAH ASET TETAP	TAGIHAN JANGKA PANJANG	Tuntutan Ganti Rugi	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	33,867,692.00	881,583,181.00	-	351,596,748,782.80	128,784,705,352.48	222,812,043,430.32		-	-	1,473,733,291.00	84,652,485,318.12	776,367,495.90
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	10,270,135,554.73	10,270,135,554.73	-	66,529,270,884.61	22,169,215,360.00	44,360,055,524.61		-	-	13,188,000.00	6,810,355,642.90	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	686,328,644.02	838,934,044.02	-	993,495,904,698.33	109,804,290,650.24	883,691,614,048.09		-	-	-	-	-
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	944,500.00	944,500.00	-	2,095,623,258.00	634,495,471.00	1,461,127,787.00		-	-		66,245,000.00	-
5	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	2,264,450.00	2,264,450.00	-	2,200,706,239.00	390,271,514.00	1,810,434,725.00		-			13,570,000.00	-
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	4,408,917,388.72	4,408,917,388.72	-	4,243,231,888.43	1,048,019,163.00	3,195,212,725.43		-	-	347,699,000.00	93,035,666.52	215,467,083.00
7	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	200,354,470.00	220,809,870.00	-	3,759,039,209.00	1,363,698,831.00	2,395,340,378.00		-	-	-	486,711,249.00	-
8	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK	-	-	12,498,000.00	2,102,100.00	14,600,100.00	-	550,366,250.00	231,486,968.00	318,879,282.00		-	-	-	27,876,000.00	-
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	1,321,000.00	1,321,000.00	-	1,947,920,271.15	520,289,518.00	1,427,630,753.15		-	-	-	6,321,000.00	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	56,666,666.67	474,861,930.00	531,528,596.67	-	2,134,474,850.00	544,737,467.00	1,589,737,383.00		-		21,230,000.00	7,135,000.00	4,422,917.00
11	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
12	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
13	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	197,116,666.67	17,640,810.00	240,933,947.67	-	18,669,481,743.40	2,929,300,110.00	15,740,181,633.40		-			291,887,654.00	-
14	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	22,689,100.00	22,689,100.00	-	17,570,074,098.00	2,181,402,976.00	15,388,671,122.00				159,500,000.00		46,520,833.00
15	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		49,500,000.00				-
16	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	-	-	1,118,067,247.00	267,137,750.00	2,769,871,586.44	-	19,754,133,606.00	2,869,667,850.00	16,884,465,756.00		-		198,737,000.00	957,687,232.00	55,010,083.00
17	INSPEKTORAT	-	-	-	7,200,000.00	7,200,000.00	-	1,595,046,600.00	471,116,523.00	1,123,930,077.00		-		37,250,000.00		37,250,000.00
18	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	-	-	1,258,500.00	5,281,000.00	6,539,500.00	-	923,589,254.41	362,950,828.00	560,638,426.41		-				-
19	KECAMATAN PADAHERANG	-	-	-	74,000.00	74,000.00	-	3,142,928,486.00	1,222,471,278.00	1,920,457,208.00		-		13,750,000.00	720,390,148.00	572,917.00
20	KECAMATAN MANGUNJAYA	-	-	-	43,000.00	43,000.00	-	2,082,442,021.00	1,212,915,553.00	869,526,468.00		-			438,372,000.00	
21	KECAMATAN KALUPUCANG	-	-	-	135,000.00	135,000.00	-	1,581,131,616.30	1,118,781,588.00	462,350,028.30		-			34,215,897.00	
22	KECAMATAN PANGANDARAN	-	-	-	1,589,800.00	1,589,800.00	-	2,775,795,875.00	579,261,434.00	2,196,534,441.00		-			623,346,750.00	
23	KECAMATAN SIDAMULIH	-	-	-	367,700.00	367,700.00	-	837,348,839.54	547,773,979.02	289,574,860.52		-			31,843,397.00	
24	KECAMATAN PARIGI	-	-	-	104,000.00	104,000.00	-	2,805,827,279.00	676,245,030.00	2,129,582,249.00		-			26,604,125.00	
25	KECAMATAN CIJULANG	-	-	-	1,479,500.00	1,479,500.00	-	3,355,844,295.70	2,485,533,628.35	870,310,667.35		-			38,029,000.00	
26	KECAMATAN CIMERAK	-	-	-	1,243,500.00	1,243,500.00	-	1,294,511,729.94	810,797,468.07	483,714,261.87		-			66,712,031.00	
27	KECAMATAN CIGUGUR	-	-	-	-	-	-	2,199,241,918.00	984,954,027.00	1,214,287,891.00		-			77,716,397.00	
28	KECAMATAN LANGKAPLANCAR	-	-	-	1,310,000.00	1,310,000.00	-	2,590,881,433.46	820,233,874.76	1,770,647,558.70		-			405,437,540.00	
29	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	12,500,000.00	108,265,130.00	120,765,130.00	-	43,672,142,631.70	7,949,175,178.00	35,722,967,453.70		-			5,629,664,404.10	
30	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	-	452,588,750.00	453,570,864.00	-	48,551,599,724.00	11,384,651,974.00	37,166,947,750.00		-			9,721,645,935.00	
NO	Perangkat Daerah Kelembagaan Baru															
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN INDUSTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		49,500,000.00				
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)	-	-	1,118,067,247.00	267,137,750.00	2,769,871,586.44	-	19,754,133,606.00	2,869,667,850.00	16,884,465,756.00		-		198,737,000.00	957,687,232.00	55,010,083.00
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama	Penyisihan Tuntutan	JUMLAH ASET LAINNYA	JUMLAH ASET	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka (Jangka Pendek)	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Pendapatan Diterima Dimuka (Jangka Panjang)	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	JUMLAH KEWAJIBAN	EKUITAS
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	85,349,851,113.22	309,043,477,724.54	-	-	-	89,670,000.00	87,006,784.00	176,676,784.00	-	-	176,676,784.00	308,866,800,940.54
2	DINAS KESEHATAN	-	6,823,543,642.90	61,453,734,722.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,281,535,746.74
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	884,530,548,092.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908,280,654,979.11
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	66,245,000.00	1,528,317,287.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,528,317,287.00
5	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	-	13,570,000.00	1,826,269,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,826,269,175.00
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	225,267,583.52	7,829,397,697.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,829,397,697.67
7	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	-	486,711,249.00	3,102,861,497.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,102,861,497.00
8	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK	-	27,876,000.00	361,355,382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361,355,382.00
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	6,321,000.00	1,435,272,753.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,435,272,753.15
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	23,942,083.00	2,145,208,062.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,145,208,062.67
11	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SEKRETARIAT DAERAH	-	291,887,654.00	16,273,003,235.07	-	-	27,453,483.00	-	15,338,458.00	42,791,941.00	-	-	42,791,941.00	16,230,211,294.07
14	SEKRETARIAT DPRD	-	112,979,167.00	15,524,339,389.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,524,339,389.00
15	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	-	49,500,000.00	49,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,460,223,928.00
16	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	-	1,101,414,149.00	20,755,751,491.44	-	-	1,122,800.00	-	-	1,122,800.00	-	-	1,122,800.00	20,754,628,691.44
17	INSPEKTORAT	-	-	1,131,130,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,131,130,077.00
18	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	-	-	567,177,926.41	-	-	2,607,025.00	-	-	2,607,025.00	-	-	2,607,025.00	564,570,901.41
19	KECAMATAN PADAHERANG	-	733,567,231.00	2,654,098,439.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,654,098,439.09
20	KECAMATAN MANGUNJAYA	-	438,372,000.00	1,307,941,468.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,307,941,468.00
21	KECAMATAN KALIPUCANG	-	34,215,897.00	496,700,925.30	-	-	1,122,209.00	-	-	1,122,209.00	-	-	1,122,209.00	495,578,716.30
22	KECAMATAN PANGANDARAN	-	623,346,750.00	2,821,470,991.00	-	-	172,000.00	-	-	172,000.00	-	-	172,000.00	2,821,298,991.00
23	KECAMATAN SIDAMULIH	-	31,843,397.00	321,785,957.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,785,957.52
24	KECAMATAN PARIGI	-	26,604,125.00	2,156,290,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,156,290,374.00
25	KECAMATAN CIJULANG	-	38,029,000.00	909,819,167.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,819,167.35
26	KECAMATAN CIMERAK	-	66,712,031.00	551,669,792.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551,669,792.87
27	KECAMATAN CIGUGUR	-	77,716,397.00	1,292,004,288.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,292,004,288.00
28	KECAMATAN LANGKAPLANCAR	-	405,437,540.00	2,177,395,098.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,177,395,098.70
29	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	5,629,664,404.10	41,473,396,987.80	-	-	-	1,521,310,400.00	-	1,521,310,400.00	-	-	1,521,310,400.00	39,952,086,587.80
30	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	9,721,645,935.00	47,342,164,549.00	-	-	-	-	982,114.00	982,114.00	-	5,799,600.00	6,781,714.00	47,335,382,835.00

			-	-										
NO	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru		-	-										
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN INDUSTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama	Penyisihan Tuntutan	JUMLAH ASET LAINNYA	JUMLAH ASET	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka (Jangka Pendek)	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Pendapatan Diterima Dimuka (Jangka Panjang)	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	JUMLAH KEWAJIBAN	EKUITAS
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)		49,500,000.00	49,500,000.00						-			-	67,460,223,928.00
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)		1,101,414,149.00	20,755,751,491.44			1,122,800.00			1,122,800.00			1,122,800.00	20,754,628,691.44
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
Pemuda Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS MUTASI KAS

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	847,715,489.00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	847,715,489.00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	152,605,400.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	133,917,300.00
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	18,688,100.00
3	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	982,114.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	982,114.00
4	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	20,455,400.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20,455,400.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS MUTASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	56,666,666.67	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	56,666,666.67
2	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN	12,500,000.00	DINAS PERTANIAN	12,500,000.00
3	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	1,258,500.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	1,258,500.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS MUTASI PERSEDIAAN

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	33,867,692.00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	33,867,692.00
2	DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATANGAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,408,917,388.72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	4,140,167,266.72
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	268,750,122.00
3	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	452,588,750.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	425,445,150.00
			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	27,143,600.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	686,328,644.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	497,678,644.02
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	188,650,000.00
5	DINAS KELAUTAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	108,265,130.00	DINAS PERTANIAN	1,774,350.00
			DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	106,490,780.00
6	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	200,354,470.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	198,473,070.00
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,881,400.00
7	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	2,264,450.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2,264,450.00
8	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	5,281,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	5,281,000.00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	474,861,930.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	474,861,930.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 29 Desember 2017
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 54

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS MUTASI ASET TETAP

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	SEKRETARIAT DAERAH	18,669,481,743.40	SEKRETARIAT DAERAH	17,962,425,691.40
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	353,797,500.00
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	353,258,552.00
2	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	351,596,748,782.80	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	351,596,748,782.80
3	DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,243,231,888.43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	3,967,877,537.43
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	178,761,872.00
			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN INDUSTRI	96,592,479.00
4	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	48,551,599,724.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	32,692,641,847.00
			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	15,858,957,877.00
			DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	981,675,196,406.33
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	993,495,904,698.33	DINAS PERHUBUNGAN	5,296,249,825.00
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1,030,633,867.00
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	3,810,032,550.00
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,683,792,050.00
			DINAS PERTANIAN	13,266,750,560.70
6	DINAS KELAUTAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	43,672,142,631.70	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	30,405,392,071.00
			DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,534,940,409.00
7	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	3,759,039,209.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	224,098,800.00
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2,200,706,239.00
8	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	2,200,706,239.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2,200,706,239.00
9	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	923,589,254.41	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	923,589,254.41
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,134,474,850.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,134,474,850.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS MUTASI ASET EXTRACOMPTABLE

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	SEKRETARIAT DAERAH	138,946,517.00	SEKRETARIAT DAERAH	136,071,667.00
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2,874,850.00
2	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	10,179,369,651.14	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	10,179,369,651.14
3	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	138,674,728.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	86,667,365.00
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50,084,863.00
			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN INDUSTRI	1,922,500.00
4	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	113,152,505.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	106,592,005.00
			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	6,560,500.00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	235,895,712.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	89,408,711.00
			DINAS PERHUBUNGAN	141,930,001.00
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	894,000.00
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	447,000.00
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,216,000.00
6	DINAS KELAUTAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	35,070,819.00	DINAS PERTANIAN	35,070,819.00
7	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	35,074,114.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	34,354,114.00
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	720,000.00
8	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	53,045,250.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	53,045,250.00
9	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	26,871,500.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	26,871,500.00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	32,620,700.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	32,620,700.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS MUTASI ASET LAINNYA

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	SEKRETARIAT DAERAH	86,418,106,263.12	SEKRETARIAT DAERAH	291,887,654.00
2	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	86,126,218,609.12
3	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	440,734,666.52	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	440,734,666.52
4	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	9,721,645,935.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8,492,167,935.00
			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	1,229,478,000.00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	52,117,067,691.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52,003,047,326.00
			DINAS PERHUBUNGAN	51,006,573.00
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	61,131,292.00
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1,182,500.00
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	700,000.00
6	DINAS KELAUTAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5,629,664,404.10	DINAS PERTANIAN	943,952,712.10
			DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	4,685,711,692.00
7	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	486,711,249.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	486,711,249.00
8	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	13,570,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	13,570,000.00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28,365,000.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28,365,000.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 29 Desember 2017
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 54

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS MUTASI UTANG PFK

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	87,006,784.00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	87,006,784.00
2	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	982,114.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	982,114.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS MUTASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	5,799,600.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5,799,600.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS UTANG BELANJA

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	2,607,025.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	2,607,025.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

No	Perangkat Daerah/Kelembagaan Lama Yang Memberi	Nilai	Perangkat Daerah/Kelembagaan Baru Yang Menerima	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	89,670,000.00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	89,670,000.00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28,893,660,950.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28,893,660,950.00
3	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1,521,310,400.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	1,521,310,400.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54

FORMAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

KOP SURAT (1)
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor:(2)

Pada hari ini,(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)..... bertempat di(7)..... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :(8).....
NIP :(9).....
Pangkat/Gol :(10).....
Jabatan :(11).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemimpin SKPD kelembagaan lama yang memberi untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :(8).....
NIP :(9).....
Pangkat/Gol :(10).....
Jabatan :(11).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemimpin SKPD kelembagaan baru yang menerima untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima(16)..... dalam rangka pencatatan saldo awal entitas akuntansi Tahun Anggaran 2017 dalam rangka implementasi kelembagaan baru di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan dan PIHAK KEDUA menerima(17)..... atas(18)..... sebesar Rp(19).....(dalam huruf), berupa:

- a.(20)..... Rp(21).....(dalam huruf), dengan rincian sebagaimana terlampir.
b. dst.....

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka tanggung jawab pengelolaan(22)..... sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima(23)..... ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai

Materai

Nama :(24)
NIP :(25)

Nama :(26)
NIP :(27)

**TATA CARA PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)**

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kop Surat
(2)	Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
(3)	Diisi dengan hari terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(4)	Diisi dengan tanggal terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(5)	Diisi dengan bulan terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(6)	Diisi dengan tahun terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(7)	Diisi tempat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(8)	Diisi dengan nama Pemimpin SKPD kelembagaan lama (PP 41 Tahun 2007)
(9)	Diisi dengan NIP Pemimpin SKPD kelembagaan lama (PP 41 Tahun 2007)
(10)	Diisi dengan pangkat/ golongan Pemimpin SKPD kelembagaan lama (PP 41 Tahun 2007)
(11)	Diisi dengan jabatan Pemimpin SKPD kelembagaan lama (PP 41 Tahun 2007)
(12)	Diisi dengan nama Pemimpin SKPD kelembagaan baru (PP 18 Tahun 2016)
(13)	Diisi dengan NIP Pemimpin SKPD kelembagaan baru (PP 18 Tahun 2016)
(14)	Diisi dengan pangkat/ golongan Pemimpin SKPD kelembagaan baru (PP 18 Tahun 2016)
(15)	Diisi dengan jabatan Pemimpin SKPD kelembagaan baru (PP 18 Tahun 2016)
(17)	Diisi dengan hak/kewajiban Diisi dengan jenis aset/kewajiban yang diserahterimakan
(16),	Keterangan:
(18),	Dalam hal nomor (17) diisi dengan hak, maka nomor (16), (18), (22), dan (23)
(22), dan	dapat diisi antara lain kas/piutang/persediaan/aset tetap/aset lainnya.
(23)	Dalam hal nomor (17) diisi dengan kewajiban, maka nomor (16), (18), (22), dan (23) diisi dengan utang.
(19)	Diisi dengan nilai rupiah aset/kewajiban yang diserahterimakan
(20)	Diisi dengan rincian aset/kewajiban yang diserahterimakan
(21)	Diisi dengan nilai rupiah rincian aset/kewajiban yang diserahterimakan
(24)	Diisi dengan nama Pihak Kedua
(25)	Diisi dengan NIP Pihak Kedua
(26)	Diisi dengan nama Pihak Pertama
(27)	Diisi dengan NIP Pihak Pertama

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 54